

Peran Uni Eropa sebagai Institusi Supranasional dalam Krisis Ukraina Tahun 2014-2019

Indah Puspasari

Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Jawa Timur

email: indahpuspasari@gmail.com

ABSTRACT

Ukrainian Crisis has become a major international issue that has attracted the attention of various actors in the international sphere, especially the European Union (EU). As one of the largest and oldest supranational institutions in the world, the EU is expected to play a main role in the process of resolving the Ukrainian Crisis. Moreover, this crisis has caused thousand of fatalities and various humanitarian violations against civilians in it. Although Ukraine is not a member of the EU, it can be seen that Ukraine is an EU 'neighbour' country that has geographical proximity to one another. Not only that, the EU is also one of the institutions that have high concern in maintaining global peace and security. So, it is not surprising when the EU starts to show its response to this issue, many actors and society who then have high expectations for the success of the EU in it. However, although the EU has taken several actions to respond to the Ukrainian Crisis, with the aim of ending the crisis and conflict in Ukraine, in fact the dispute between Ukraine and Russia which is the root of the Ukrainian Crisis continues to this day. Or rather, about 6 years. Based on that, this research was made to evaluate the role of the EU as a supranational institution in resolving the Ukrainian Crisis. The framework that used to analyze this problem is the concept of Supranational Institutions and the Responsibility to Protect. Using descriptive qualitative research methods, data will be collected from books, journal articles, official reports and media publications to explain clearly the EU's effort in the Ukrainian Crisis resolution process.

Keywords: *Ukrainian Crisis, European Union, Supranational Institution.*

Krisis Ukraina telah menjadi isu internasional utama yang menarik perhatian berbagai aktor dalam lingkup internasional, khususnya Uni Eropa (UE). Sebagai salah satu institusi supranasional terbesar dan tertua di dunia, UE diharapkan dapat memainkan peran besar dalam proses penyelesaian Krisis Ukraina ini. Terlebih, krisis ini telah menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan berbagai pelanggaran kemanusiaan terhadap warga sipil didalamnya. Walaupun Ukraina tidak termasuk dalam keanggotaan UE, namun dapat terlihat bahwasannya Ukraina merupakan negara 'tetangga' UE yang memiliki kedekatan geografis satu sama lain. Tak hanya itu, UE juga termasuk salah satu institusi yang memiliki kepedulian tinggi dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Sehingga, tidak mengherankan ketika UE mulai memperlihatkan responnya terhadap permasalahan ini, banyak aktor dan masyarakat yang kemudian berekspektasi tinggi terhadap keberhasilan UE didalamnya. Akan tetapi, walaupun UE telah mengambil beberapa tindakan untuk menanggapi Krisis Ukraina, dengan tujuan untuk mengakhiri krisis dan konflik di Ukraina, nyatanya perselisihan diantara Ukraina-Rusia yang menjadi akar dari Krisis Ukraina ini masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Atau lebih tepatnya sekitar 6 tahun lamanya. Berdasarkan itu, penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi peran UE sebagai institusi supranasional dalam menyelesaikan Krisis Ukraina. Kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini ialah konsep Institusi Supranasional dan Responsibility to Protect. Dengan data yang telah dikumpulkan dari buku, artikel jurnal penelitian, laporan resmi serta publikasi media. Data-data ini kemudian akan diuji menggunakan metode diskriptif kualitatif untuk menjelaskan dengan baik mengenai upaya UE dalam proses penyelesaian Krisis Ukraina.

Kata Kunci : *Krisis Ukraina, Uni Eropa, Institusi Supranasional.*

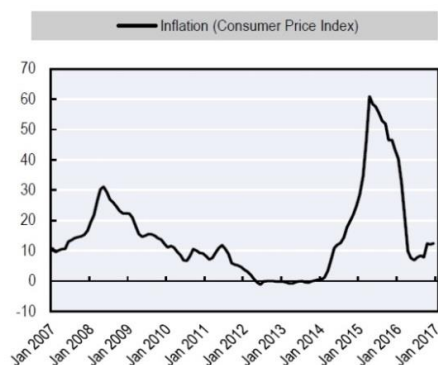
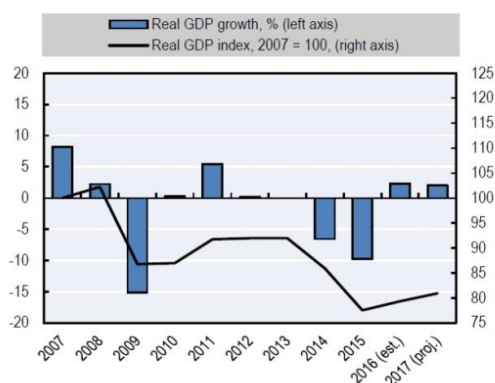
Latar Belakang Masalah

Uni Eropa (UE) merupakan institusi supranasional terbesar dan tertua di dunia internasional. Dengan tujuan utama yang berfokus pada upaya mempromosikan perdamaian, kesejahteraan, kebebasan, serta yang lainnya, UE berhasil mengimplementasikan tujuan institusinya dengan baik. Sehingga, mampu memberikan pencapaian yang memuaskan serta menghantarkan UE menjadi salah satu institusi supranasional terkemuka dengan kekuatan besar yang diakui, terlebih dalam lingkup internasional. Pencapaian UE dapat terlihat dari terciptanya perdamaian, stabilitas dan kemakmuran atas standar hidup masyarakat di Eropa yang berlangsung selama hampir setengah abad (European Union n.d.).

Sedangkan di lingkup internasional, UE memiliki *EU's Foreign and Security Policy* untuk meningkatkan stabilitas di lingkungan Eropa dan sekitarnya, khususnya di bidang pertahanan. Kebijakan ini dirancang untuk menyelesaikan krisis maupun konflik yang dialami oleh suatu negara melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, kerjasama pembangunan maupun perdagangan (European Union n.d.). Berdasarkan kebijakan ini, UE secara aktif berkontribusi dalam upaya diplomasi untuk menumbuhkan keamanan, kesejahteraan, demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum di tingkat internasional. Pun komitmen UE untuk membantu korban bencana, baik akibat perbuatan manusia maupun bencana alam, berhasil menjadikan UE sebagai donor bantuan kemanusiaan terkemuka di dunia (European Union n.d.). Sejalan dengan kebijakan ini, adapula *European Neighbourhood Policy* (ENP) yang dibentuk khusus untuk negara-negara tetangga yang tidak tergabung dalam UE. Tujuannya yakni untuk memajukan dan menyejahterakan kondisi negara tetangganya agar stabilitas dan keamanan regional disekitar UE tetap terjaga (European Union External Action 2016).

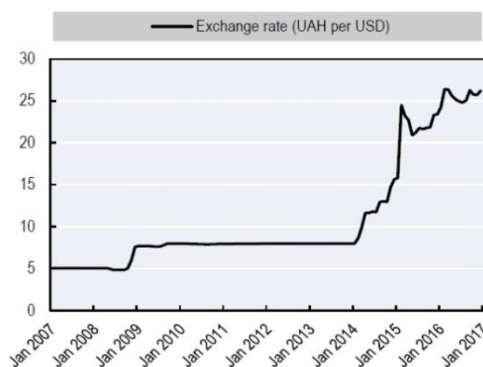
Di sisi lain, Ukraina, merupakan negara tetangga UE yang terletak di wilayah Eropa Timur. Akan tetapi, sekitar akhir tahun 2013, kondisi domestik Ukraina bisa dikatakan mulai kacau. Perekonomian yang tidak stabil sejak terdampak Krisis Finansial Global 2008, diperburuk dengan banyaknya korupsi di pemerintahan, menyebabkan keadaan di Ukraina cukup buruk. Satu-satunya harapan untuk meningkatkan kesejahteraan Ukraina hanyalah *Association Agreement* (AA's) dengan UE, yang justru ditolak oleh Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovich. Tindakan ini kemudian memicu protes besar-besaran dari kelompok *Euromaidan* yang menentang keputusan Yanukovich (Mandel 2016). Puncaknya, protes ini berujung pada keributan yang menyebabkan tewasnya 77 orang demonstran (BBC 2020). Yanukovich kemudian melarikan diri keluar negeri yang berakhir dengan perpindahan kekuasaan ke tangan para demonstran. Peristiwa ini kemudian menyebabkan Ukraina mengalami ketidakstabilan ekonomi mulai dari Produk Domestik Bruto (PDB) menurun drastis, inflasi meningkat tajam sampai dengan nilai tukar mata uang melemah (OECD 2018) (Lihat Gambar 1.1-1.3).

Kekacauan kondisi domestik di Ukraina ini diperparah dengan adanya intervensi dari Rusia yang memanfaatkan keadaan dengan mengirimkan pasukannya ke Semenanjung Krimea milik Ukraina dan mengambil alih kontrol keseluruhan di wilayah tersebut pada Maret 2014 (Haukkala 2015). Aneksasi ilegal Krimea tersebut menyebabkan aktor-aktor internasional mengecam Rusia karena dianggap telah melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, masyarakat Krimea atau lebih tepatnya klan *Tatars Crimean* yang menolak aneksasi dan pemisahan diri Krimea dari Ukraina justru mendapatkan pelanggaran kemanusiaan seperti intimidasi, penganiayaan, penculikan dan lebih buruknya adalah pembunuhan. Pun dilansir dari Laporan Uni Eropa pada tahun 2018, penangkapan dan pencarian rumah terhadap klan Tatars masih terus berlanjut. Tercantum pula dalam laporan tersebut bahwasannya kondisi dari tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi penahanan warga yang kontra di Krimea tersebut tergolong tidak manusiawi (European Commission 2019).



Gambar 1.1 (PDB Ukraina 2007-2017)

Gambar 1.2 (Tingkat Inflasi Ukraina 2007-2017)



Gambar 1.3 (Nilai Tukar Ukraina 2007-2017)

Sumber: OECD Report

Tidak berhenti sampai disitu, Rusia juga melakukan intervensi pada kelompok separatis di wilayah Timur Ukraina yakni *Donbass Region* agar melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Aksi ini menyebabkan pecahnya konfrontasi militer antara kelompok separatis di Timur Ukraina dengan pemerintah (Bebler 2015). Berdasarkan pernyataan dari *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, korban jiwa akibat konflik di Timur Ukraina sampai dengan tahun 2019 yakni sebanyak 13.000 jiwa meninggal dunia, sedangkan 24.000 jiwa lainnya mengalami luka-luka (King 2019). Pun lebih dari 3,5 juta jiwa di Timur Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan dikarenakan adanya penembakan terhadap warga sipil tanpa pandang bulu, penghentian air, pemadaman listrik, serta tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Karena itu, wilayah Timur Ukraina termasuk dalam salah satu kategori daerah paling mematikan di dunia, terutama bagi masyarakat yang tinggal didalamnya (ReliefWeb 2018). Terlebih, para pemberontak ini juga merugikan negara lain dimana pada tahun 2014, mereka menembak jatuh maskapai Malaysia yakni *Malaysian Airlines MH17* dan menewaskan sekitar 298 orang (European Commission 2019).

Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, situasi di Ukraina bisa dikatakan masih tidak stabil. Pemerintahan yang baru berganti tangan menyebabkan kekuatan pemerintah masih sangat kurang. Sehingga, putusan perintah yang dikeluarkan untuk merespon tindakan Rusia di Krimea dan Timur Ukraina cenderung tidak efektif. Konflik yang ditimbulkan akibat tindakan Rusia ke Ukraina ini pun kemudian mengakibatkan krisis di Ukraina, mulai dari krisis ekonomi, politik sampai dengan yang utama yakni krisis kemanusiaan yang menyebabkan Krisis Ukraina ini dianggap sebagai krisis internasional (Bojcun 2015).

Jika dilihat dari prinsip dan kebijakan dari UE, bersamaan dengan urgensi dari Krisis Ukraina, terlebih sebagai negara tetangga yang memiliki kedekatan geografis, penerapan ENP tentu menjadi elemen yang perlu dipertimbangkan dalam permasalahan ini. Terlebih, jika mengacu pada ENP, maka UE memiliki kepentingan untuk membantu penanganan krisis di Ukraina. Didasarkan pada statmen dari UE yang akan senantiasa membantu negara dalam menuntaskan krisis dan konflik untuk menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan UE, menjadikan kasus Ukraina muncul sebagai kandidat yang tepat untuk diperhatikan oleh UE. Karena itu, segera setelah Krisis Ukraina itu muncul, UE dengan sigap langsung meresponnya. Akan tetapi, sampai dengan saat pembuatan *paper* ini, krisis di Ukraina masih terus berlangsung dan nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan setelah 6 tahun lamanya. Padahal, UE merupakan institusi supranasional yang cukup cakap, melihat dari pencapaian dan peranan besarnya di dunia internasional, khususnya dalam merespon dan mengatasi isu-isu internasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mencoba untuk mengevaluasi peran dari UE dalam proses penyelesaian Krisis Ukraina ini. Sehingga, dapat ditemukan rumusan masalah yakni “Bagaimana peran Uni Eropa selaku institusi supranasional dalam membantu penyelesaian Krisis Ukraina sebagai negara tetangganya pada tahun 2014-2019?”. Rentang waktu ini dipilih lantaran AA’s, selaku implementasi dari ENP, disepakati oleh Ukraina-UE di tahun 2014, dan penerapannya sejauh ini untuk mengevaluasi peran UE selama 6 tahun terakhir.

Tinjauan Pustaka

Untuk menjelaskan terkait peran Uni Eropa sebagai institusi supranasional dalam proses penyelesaian krisis, penulis telah merangkum beberapa literatur yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat. Pertama yaitu Gehring et al., (2017), yang dalam artikelnya membahas terkait Uni Eropa (UE) yang bertindak sebagai *great power* dalam krisis keamanan di Ukraina tanpa adanya kapabilitas atau kemampuan militer yang besar. Dengan kurangnya kontrol atas kekuatan militer, yang biasanya digunakan sebagai instrumen untuk menunjang tujuan *high-politics*, UE justru menggunakan kekuatan pasarnya sebagai alat untuk mencapai *great power*. Sebagaimana telah diketahui bahwa UE memiliki kekuatan ekonomi melalui pasar yang berpengaruh di dunia internasional. Terbukti dari dikeluarkannya sanksi ekonomi pada Rusia yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap perekonomiannya. Namun, tindakan ini berakibat fatal bagi UE yang secara tidak sengaja menempatkan posisinya dalam perebutan kekuasaan atas Ukraina yang kemudian memicu timbulnya konflik militer di Timur Ukraina (Gehring et al. 2017).

Cross dan Karolewski (2016) dalam artikelnya membahas mengenai kekuatan UE dalam sistem internasional melalui responnya terhadap krisis di Ukraina. Sebelum itu, UE diklasifikasikan sebagai aktor dalam kebijakan luar negeri yang berkewajiban untuk merespon permasalahan yang terjadi di lingkup internasional. Namun, para *scholars* terdahulu menganggap UE belum cukup kuat untuk melakukan tindakan yang signifikan. Alasannya karena UE ‘hampir’ selalu gagal dalam menghadapi masalah yang sedang berlangsung. Padahal, UE seharusnya memiliki kekuatan yang cukup besar ketika mengeluarkan kebijakan luar negeri agar dapat meredakan krisis. Sebaliknya, menurut Cross dan Karolewski, justru krisis di Ukraina yang memicu meningkatnya kekuatan UE tersebut. Sehingga, respon UE dalam krisis Ukraina dianggap berfungsi untuk melatih peningkatan kekuatan UE (Cross & Karolewski 2016).

Scrinic (2014) dalam artikelnya membahas mengenai respon UE terhadap krisis kemanusiaan di wilayah Timur Ukraina akibat penggunaan senjata militer kelompok separatis yang didalangi oleh Rusia. Sebagai salah satu pemimpin di dunia yang menjunjung kekuatan normatif, UE dirasa memiliki kewajiban untuk merespon krisis di Ukraina. Kondisi

yang tidak stabil akibat konfrontasi militer oleh kelompok separatis mengakibatkan masalah kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Krisis kemanusiaan tersebut kemudian segera direspon oleh UE dengan memberikan bantuan kemanusiaan sampai dengan pemberian sanksi pada Rusia. Namun nyatanya, UE disini dianggap kurang berpengaruh dalam panggung internasional, karena belum mampu untuk memaksakan kepentingannya agar Rusia menghentikan penggunaan militernya (Scriinic 2014).

Elgström et al. (2018) dalam artikelnya berfokus pada persepsi elit lokal terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh UE terhadap konflik antara Ukraina-Rusia dengan Israel-Palestina. Penulis berasumsi bahwa UE sebagai mediator tidak memainkan perannya selaku *honest broker* yang seharusnya bersikap netral dalam proses berlangsungnya mediasi konflik. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dari responden yang merasakan langsung dampak dari proses mediasi UE terhadap konflik di negaranya. Berdasarkan data tersebut, UE dianggap sebagai *biased mediator*, karena cenderung menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak. Selain itu, keefektifan UE sebagai mediator juga dianggap masih kurang karena konflik masih saja berlangsung serta tidak ada perubahan pada situasi konflik yang menggunakan kekerasan (Elgström et al. 2018).

Robertshaw (2015) dalam artikelnya mengambil pandangan mengenai kesalahan UE dalam membaca persepsi Rusia di Krisis Ukraina. Berbeda dengan UE yang melihat krisis dengan kaca mata demokratisasi dan ekonomi, Rusia sebenarnya membingkai krisis ini dari segi keamanan. Akibatnya, UE cenderung merespon krisis di Ukraina dengan kebijakan luar negeri yang kurang tepat. Walaupun begitu, penerapan kebijakan UE dalam bidang ekonomi tampak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Rusia. Akan tetapi, UE tetap harus mempertimbangkan kembali kapabilitas keamanannya karena ditakutkan dapat berpotensi untuk berperang dalam tindakan Rusia. Karena apabila benar terjadi, maka pencegahan dan penyelesaian krisis akan lebih menantang (Robertshaw 2015).

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dicantumkan diatas, dapat ditemukan kesamaan dalam hal keterlibatan UE dalam Krisis Ukraina, hanya saja terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya. Berdasarkan kelima literatur tersebut, penulis mendapat *research gap* yakni Peran UE sebagai institusi supranasional dalam membantu proses penyelesaian krisis Ukraina. Yang diambil atas dasar adanya relevansi antar literatur terkait tindakan dan kekuatan UE dalam Krisis Ukraina. Disini, penulis memilih kekuatan dari segi UE sebagai Institusi Supranasional, yang diperkirakan dapat mendukung tindakan serta perannya ketika merespon Krisis Ukraina. Sebagaimana UE sebagai institusi supranasional memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasannya. Didukung dengan adanya kebijakan khusus untuk negara tetangganya yang diatur dalam ENP. Maka dari itu, penulis berniat untuk membedah skema dari ENP ini, agar dapat mengetahui bagaimana peranan UE terhadap Ukraina mengacu pada kebijakan ENP ini.

Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran UE selaku institusi supranasional dalam proses penyelesaian krisis di Ukraina sebagai negara tetangganya, akan digunakan konsep institusi supranasional dan konsep *Responsibility to Protect*. Konsep institusi supranasional diharapkan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang kewenangan dan keistimewaan dari UE sebagai institusi supranasional dalam menangani isu global. Sedangkan konsep *Responsibility to Protect* diambil lantaran sesuai dengan permasalahan yang ada di Ukraina yakni pelanggaran kemanusiaan di Krimea dan *Donbass Region* akibat intervensi dari Rusia. Sehingga dinilai dapat menjelaskan peran UE dalam proses penyelesaian Krisis Ukraina. Kedua konsep ini dipilih karena dianggap dapat diterapkan untuk mengevaluasi peran UE di Ukraina.

Konsep Uni Eropa sebagai Institusi Supranasional

Ruszkowski melihat institusi supranasional sebagai lembaga yang beroperasi dalam sistem hirarkis dengan tidak adanya perwakilan dalam bentuk negara, melainkan tiap-tiap negara anggota mendelegasikan representasi kekuatan nasionalnya dalam institusi yang dibentuk sesuai dengan bidangnya (Ruszkowski 2009, 007). Dalam struktur UE sendiri, beberapa diantaranya adalah *European Parliament* yang mewakili warga negara UE, *European Council* yang terdiri dari Kepala Negara atau Pemerintah negara anggota UE, *The Council* yang merepresentasikan pejabat dari negara-negara anggota, kemudian *European Commission* sebagai perwakilan dari kepentingan UE secara keseluruhan (European Union 2018). Pengaturan dengan model seperti ini dapat diterapkan lantaran institusi supranasional menganut sistem yang mengharuskan negara anggotanya untuk memberikan sebagian dari kedaulatannya kepada institusi. Karenanya, delegasi dalam UE tidak berbentuk representasi negara melainkan kekuatan nasional.

Sebagaimana sistem ini diterapkan, institusi supranasional pasti akan bertindak 'satu suara'. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan, prosedur yang digunakan harus bersifat kolektif, dimana tiap-tiap bagian dalam institusi harus sepakat menyetujui keputusan yang sama (Gruber 2000). Kesepakatan ini nantinya akan dibentuk dalam perjanjian yang akan digunakan sebagai pedoman sebelum melakukan tindakan terhadap permasalahan baik didalam maupun diluar kawasan UE. Dari sini, dapat terlihat bahwa institusi supranasional merupakan institusi dengan karakteristik menyerupai negara. Namun, dengan model administrasi yang digambarkan sebagai pemerintahan multi-level, yang merupakan tingkatan tertinggi yakni internasional dengan cakupan nasional dan regional (Ruszkowski 2009).

Hal ini bisa dikatakan memberikan keistimewaan tersendiri bagi institusi supranasional, khususnya UE. Berdasarkan Langenhove dan Mess (2012), dukungan dari warga negara UE yang tergabung dalam *European Parliament* memiliki peranan penting terlebih dalam memberikan pengaruh atas otoritas di tingkat global. Sekaligus, dapat mempengaruhi kesediaan negara-negara anggota UE untuk melibatkan sumber dayanya untuk merespon permasalahan global (Langenhove & Maes 2012). Alhasil, UE sebagai institusi supranasional yang utamanya bergerak di tingkat regional dapat melebarkan sayapnya dalam ranah internasional. Pun, UE juga dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian isu internasional walaupun bukan termasuk negara anggotanya. Didukung dengan sumber daya yang diberikan oleh negara-negara anggota UE, sebagaimana adanya permintaan dari masyarakatnya yang diwakili oleh *European Parliament*, maka proses penyelesaian permasalahan global tentu akan lebih efektif.

Dengan sistem yang sedemikian rupa, masyarakat akhirnya beranggapan bahwa institusi supranasional dapat menjadi instrumen masa depan yang bersifat altruistik dan mampu membantu mengatasi permasalahan yang belum terpecahkan (Ruszkowski, 2009). Atas dasar itu, UE sebagai institusi supranasional memiliki kewajiban tidak hanya dalam ruang lingkup regionalnya saja, namun juga pada masyarakat internasional. Inilah yang kemudian mendorong UE untuk bertindak dalam penanganan isu-isu internasional. Terlebih, dengan pertimbangan atas kekuatan UE baik dari segi ekonomi maupun politik yang cukup mumpuni sekaligus mencakup negara-negara mapan di Eropa. Sehingga, UE dianggap mampu untuk membawa perubahan dan penyelesaian, terutama dalam Krisis Ukraina.

Konsep *Responsibility to Protect*

Peranan institusi dalam mengatasi permasalahan seperti krisis atau konflik akan dijelaskan menggunakan kerangka konseptual yakni *Responsibility to Protect*. Merujuk pada Kabau (2012), konsep *Responsibility to Protect* berfokus pada intervensi yang dilakukan oleh

komunitas internasional dalam mencegah tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau pembersihan etnis. Konsep ini dipilih dengan melihat kesesuaian konsep dengan peristiwa di Krimea dan *Donbass Region*, yang dapat dikategorikan dalam tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam implementasinya, konsep ini mewakili hukum yang memberikan kuasa dan yurisdiksi terhadap komunitas internasional untuk melakukan tindakan intervensi. Adapula mekanisme dari *Responsibility to Protect* terdiri dari tiga pendekatan yang meliputi *forceful intervention*, *peaceful negotiations* dan *consensual interventions* (Kabau 2012).

Forceful intervention dilakukan melalui intervensi paksa ketika penggunaan cara damai sudah tidak memadai. Sehingga, institusi dapat melakukan tindakan yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian *peaceful negotiations*, merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara negosiasi damai, seperti halnya mediasi. Sedangkan *consensual intervention* merupakan upaya penyelesaian konflik namun dengan cara intervensi yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak. Tindakannya bisa berupa *peacekeeping*, ataupun tindakan intervensi lain yang disepakati bersama antara kedua belah pihak (Kabau 2012).

Dengan demikian, maka UE sebagai institusi supranasional tentu memiliki kewajiban untuk menerapkan konsep *Responsibility to Protect* dalam Krisis Ukraina. Didasarkan pada konflik diantara Ukraina-Rusia baik di Krimea maupun *Donbass Region* yang melibatkan kekerasan sehingga timbul banyak korban jiwa. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghalau bertambahnya korban seperti ini ialah dengan penerapan *Responsibility to Protect*. Dimana konsep ini dapat diterapkan untuk mencapai solusi atas penyelesaian konflik yang juga berarti menghentikan jatuhnya korban jiwa.

Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah menggunakan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka akan digunakan metode penelitian kualitatif, yang pada umumnya merujuk pada teknik analisis atau pengumpulan data non-numerik (Lamont 2015). Sebagai pendukungnya, pendekatan deskriptif juga akan digunakan untuk menggambarkan dengan jelas mengenai peranan UE dalam membantu penanganan dan proses penyelesaian Krisis Ukraina. Untuk menunjang hasil dari penelitian, pengumpulan data akan diambil berdasarkan sumber data sekunder mulai dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi, website maupun media. Terkait dengan kebijakan yang telah diambil UE terhadap Krisis Ukraina seperti halnya *European Neighbourhood Policy* (ENP) dan *Association Agreement* (AA), akan didapatkan dari website resmi UE. Adapula penerapan dari kebijakan UE yang telah disebutkan diatas juga akan disajikan berdasarkan data dari laporan-laporan resmi yang bersumber dari UE, *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) maupun *The European Council on Foreign Relations*.

Peran Uni Eropa

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat terlihat bahwasannya Ukraina mengalami krisis terutama dibidang perekonomian, keamanan dan kemanusiaan. Oleh karenanya, sebagai institusi supranasional, UE tentu memiliki kepentingan untuk merespon permasalahan ini. Terlebih, melihat lokasi Ukraina yang sangat berdekatan dengan UE. Hal ini bisa dilakukan oleh UE lantaran sebagai institusi supranasional, UE memiliki kewenangan untuk merespon dan memberikan bantuan yang diperlukan bagi negara-negara yang membutuhkan, walaupun negara tersebut bukan merupakan negara anggotanya. Pernyataan ini didukung dengan penjelasan dari konsep institusi supranasional menurut Ruszkowski (2009), sebagaimana institusi ini memiliki keistimewaan tersendiri, dimana sistem organisasinya yang mengharuskan anggotanya untuk memberikan setengah

dari kedaulatannya kepada institusi, mampu membentuk suatu kesatuan yang bertindak satu suara. Oleh karenanya, walaupun tergolong sebagai organisasi, namun UE cenderung berperilaku seperti negara. Inilah yang kemudian mampu membuat UE mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dikhususkan untuk merespon krisis maupun konflik negara yang berada diluar keanggotaannya, dengan tujuan menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan sekitar UE. Kebijakan ini dapat terlihat dari implementasi atas ENP yang dikhususkan untuk mengatasi krisis dan konflik yang dialami oleh negara tetangga disekitar lingkungan UE. Negara-negara tetangga tersebut tergabung dalam *Eastern Partnership* yang meliputi negara-negara tetangga UE, salah satunya yakni Ukraina sendiri (European Union n.d.).

Untuk menindaklanjuti penerapan dari ENP tersebut, UE membentuk kerangka kerja melalui kesepakatan bilateral berupa AA. Mengacu pada AA, UE berkomitmen untuk memperkuat perdamaian dan keamanan, mempromosikan kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah dan perbatasan, serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan perdagangan di Ukraina. Dalam mencapai komitmen-komitmen AA ini, UE menerapkan pendekatan berupa integrasi ekonomi dan asosiasi politik. Integrasi ekonomi disini akan diimplementasikan melalui *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA). Sedangkan asosiasi politik akan dimulai dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi yang telah dirancang oleh UE (European Union 2014). Tindakan ini diharapkan dapat mengembalikan kondisi Ukraina seperti sedia kala, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga, tahapan selanjutnya yakni proses penyelesaian konflik di Krimea dan di wilayah Timur Ukraina dapat diperhatikan lebih dalam, tidak terpecah fokusnya dengan permasalahan perekonomian ataupun politik negara. Sebagaimana kondisi domestik yang kacau tentu akan menyulitkan Ukraina untuk mengambil keputusan dalam merespon konflik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dampak dari Krisis Ukraina terutama di wilayah Krimea dan Timur Ukraina, banyak menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran kemanusiaan. Argumen ini diperkuat dengan pemerintah Ukraina yang mengajukan deklarasi berdasarkan pasal 12 (3) atau *Rome Statute*, atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Ukraina sejak 2014 kepada Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) (European Commission, 2016). Jika ditelaah berdasarkan kejahatan perang dan kemanusiaan yang melibatkan warga sipil, maka konteks ini sesuai dengan konsep *Responsibility to Protect* menurut Kabau (2012), yang merupakan intervensi yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam mencegah tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau pembersihan etnis. Dengan begitu, maka untuk menjawab bagaimana peran UE dalam merespon Krisis Ukraina yang menyebabkan munculnya isu kemanusiaan, dapat dibedah menggunakan indikator-indikator dari *Responsibility to Protect* ini. Konsep ini sendiri terbagi menjadi tiga indikator, yang pertama yakni *consensual intervention* yang dapat terlihat dari upaya penyelesaian konflik dengan cara intervensi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua yaitu *peaceful negotiation* yang dapat dilihat melalui upaya penyelesaian konflik dengan cara kesepakatan atau perjanjian damai. Terbukti dari UE yang secara aktif berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi terkait penyelesaian konflik Ukraina. Sedangkan yang terakhir yakni *forceful intervention* yang merupakan intervensi paksa ketika cara damai sudah tidak lagi berpengaruh. Dibuktikan dengan UE yang mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Rusia ketika perjanjian damai tidak ditepati oleh Rusia.

Consensual Intervention

Upaya pertama untuk menyelesaikan krisis di Ukraina ialah melalui intervensi konsensual yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam kasus ini, UE bersama dengan Ukraina bekerjasama dalam kesepakatan AA yang merupakan perpanjangan tangan dari ENP. Sesuai dengan yang tercantum dalam AA, beberapa kesepakatan konsensual diantara UE-Ukraina

ialah bantuan kemanusiaan, ekonomi dan keamanan sekaligus reformasi seputar sektor-sektor terkait. Implementasi beberapa hal tersebut tidak terlepas dari agenda utama UE terkait Krisis Ukraina di tahun 2014, dimana institusinya sangat mengedepankan aspek kemanusiaan sebagai perhatian utamanya. Terlebih, dengan mempertimbangkan dampak dari krisis yang merambat hingga memunculkan konflik dengan banyak korban jiwa di Ukraina (European Commission 2015).

1. Aspek Kemanusiaan

Sejak awal, UE telah menyatakan bahwasannya dalam merespon Krisis Ukraina, institusinya akan mengutamakan aspek kemanusiaan dalam pelaksanaan agendanya. Oleh karena itu, sejak Krisis Ukraina bermula, *European Commission* secara aktif menyediakan bantuan kemanusiaan kepada populasi yang terdampak, terutama di wilayah Timur Ukraina dan sekitarnya. Dukungan berupa bantuan kemanusiaan yang disediakan oleh UE ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak krisis dan konflik mulai dari orang-orang yang dipindahkan secara internal, orang-orang terlantar, masyarakat yang menetap di wilayah konflik maupun para pengungsi yang mencari perlindungan hingga melintasi perbatasan Ukraina. Bantuan tersebut meliputi distribusi makanan, pakaian, air minum, berbagai peralatan dan persediaan kebersihan personal, layanan kesehatan hingga tempat penampungan darurat. Tak hanya itu, UE juga mengirimkan pasokan darurat seperti selimut, kantong tidur, pemanas dan perlengkapan kebersihan seberat 85 ton menggunakan pesawat kargo dan truk ke Ukraina (European Commission 2015).

Dalam implementasinya di lapangan, utamanya terkait pemberian bantuan-bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Ukraina, UE tidaklah berjalan sendirian. Disini, UE mengoperasikan *The EU's Civil Protection and Humanitarian Aid Operations* (ECHO) mulai tahun 2014 atau lebih tepatnya sejak pecahnya krisis di Ukraina. ECHO telah memainkan peran kunci dalam menanggapi Krisis Ukraina, utamanya sebagai fasilitator dalam berlangsungnya koordinasi maupun pemberian informasi terkait isu kemanusiaan di Ukraina antara pihak berwenang, mitra bantuan, pendonor bantuan maupun organisasi kemanusiaan (European Commission, 2019). Ya, disini, UE bekerjasama dengan para organisasi yang merupakan mitra kerjanya seperti halnya *People in Need, Save the Children, International Committee of the Red Cross* maupun organisasi-organisasi yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dari UE (Europa Nu 2015).

Berbagai organisasi yang telah disebutkan tersebut berperan untuk memastikan diterimanya bantuan kemanusiaan oleh masyarakat Ukraina yang terdampak krisis dan konflik. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat yang terdampak tidak hanya berada di area konflik saja namun juga ada yang telah mengungsi diluar perbatasan negara Ukraina seperti di Rusia dan Belarus. Dalam penerapannya pun, berbagai organisasi ini juga turut memberikan layanan berupa bantuan hukum dan psikososial bagi para korban yang membutuhkan. Pun untuk mendukung upaya ini, di awal tahun 2015 UE membentuk sebuah tim yang beranggotakan para ahli dari tujuh negara anggota UE, yang bertujuan untuk mendukung otoritas nasional di bidang perlindungan sipil bagi masyarakat Ukraina yang sedang berada ditengah krisis dan konflik (Europa Nu 2015).

Namun, tak hanya menyediakan bantuan kemanusiaan dalam bentuk perlengkapan dan kebutuhan masyarakat saja, UE kembali memberikan bantuan berupa dana untuk mendukung bantuan kemanusiaan yang telah diberikan. Dana ini ditujukan untuk perbaikan tempat tinggal atau penampungan sementara para korban konflik, perawatan layanan kesehatan, persediaan tambahan kebutuhan utama seperti air dan makanan, serta pembentukan proyek pendidikan dalam keadaan darurat. UE menyatakan bahwa dana ini akan diberikan secara berkala setiap tahunnya pada kamp-kamp yang ada disepanjang garis

konflik dan area yang dikontrol oleh non-pemerintah (European Commission, 2019). Jika ditotal, dana untuk bantuan kemanusiaan dari UE sejak tahun 2014 sampai dengan saat akhir tahun 2019 ini berkisar sebesar €133,8 juta, yang dengan ini telah menjadikan UE sebagai donor terbesar atas bantuan kemanusiaan di Ukraina (European Commission 2019).

2. Sektor Perekonomian

Untuk mendukung stabilisasi Ukraina yang sedang dilanda krisis, UE telah memberikan bantuan finansial dalam bentuk hibah dan pinjaman lebih dari €15 miliar sejak tahun 2014 (European Commission, 2019). Namun, bantuan finansial tersebut dapat dikatakan merupakan solusi jangka pendek. Untuk solusi jangka panjangnya, UE lebih menekankan pada pentingnya penerapan liberalisasi perdagangan sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi di Ukraina, yang dapat diterapkan melalui DCFTA (European Commission 2015). Sebagaimana kemakmuran dalam bidang ekonomi mampu membawa negara menuju kestabilan.

Sebelum DCFTA terlaksana, yakni pada 1 Januari 2016, UE tetap melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian Ukraina yang sedang dalam masa krisis. Dapat terlihat dari UE yang memberikan akses preferensial kepada para eksportir Ukraina ke pasar UE, yang dibarengi dengan penghapusan tarif bea terhadap beberapa sektor komoditas ekspor dari Ukraina. Pengurangan tarif ini diperkirakan berjumlah hampir €500 juta yang tentunya sangat membantu kondisi perekonomian Ukraina. Upaya penghapusan tarif bea ini dilakukan oleh UE sebagai bentuk dukungan kepada Ukraina yang kemudian tetap diberlakukan dalam DCFTA (European Commission 2015).

Adapula program yang termasuk dalam salah satu instrumen UE dalam merespon krisis, yang dikhususkan bagi negara-negara tetangga UE, yang tergabung dalam ENP, serta sedang mengalami permasalahan neraca pembayaran yang cukup krusial. Program ini dinamakan *Macro Financial Assistance* (MFA), yang merupakan bantuan keuangan berupa dana pinjaman jangka menengah atau jangka panjang yang hanya tersedia untuk negara-negara yang mendapatkan bantuan dari program *International Monetary Fund* (IMF). Sebagaimana MFA disini difokuskan sebagai solusi dalam menghadapi kesulitan atau krisis neraca pembayaran, tujuan utama dari MFA ini sendiri ialah pemulihan situasi keuangan eksternal untuk mendorong penyesuaian ekonomi di negara terkait. Jadi, dana MFA ini nantinya akan dicairkan melalui bank sentral negara-negara penerimanya. Kemudian, dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemerintah, utamanya yakni untuk pelaksanaan reformasi, sebagai cadangan, dukungan anggaran langsung maupun intervensi pasar valuta asing. Sehingga, MFA ini pun dinilai dapat melengkapi bantuan yang telah diberikan oleh IMF (European Commission n.d.).

Dalam kasus Ukraina sendiri, MFA bertujuan untuk mendukung keuangan Ukraina yang diperlukan untuk menerapkan strategi reformasi guna memperkuat negara dalam menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan keamanan, terlebih di masa krisis. Reformasi ini terkait dengan reformasi fiskal, sektor keuangan, manajemen keuangan publik serta restrukturisasi perdagangan, perusahaan hingga lingkungan bisnis. Dengan begitu maka neraca pembayaran jangka pendek dan kerentanan fiskal seperti resesi dan inflasi dapat ditekan seminimal mungkin (European Commission, n.d.). Utamanya, tindakan reformasi-reformasi ini difokuskan pada sektor ekonomi, dikarenakan untuk melakukan reformasi-reformasi dibidang lain terkait penanganan terhadap konflik yang menimbulkan krisis-krisis baru, dibutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu, program MFA dinilai merupakan langkah strategis untuk memulihkan perekonomian di Ukraina agar dapat menunjang langkah untuk merespon dan menanggulangi krisis dan konflik yang belum terselesaikan. Sampai dengan tahun 2015, UE telah mencairkan MFA kepada Ukraina secara bertahap sebanyak 3 kali dengan total sebesar €1,61 milyar (European Commission 2015).

Kemudian di tahun 2017, UE menerapkan program *EU Support to the East of Ukraine* dan menggelontorkan dana sebesar €50 juta dengan tujuan untuk memulihkan keadaan sosial dan ekonomi di wilayah konflik Timur Ukraina. Selanjutnya di tahun 2018, UE kembali memberikan dana sebesar €50 juta untuk proyek-proyek seperti halnya pengelolaan limbah padat, air maupun transportasi. Pun setelahnya, UE masih menambahkan €25 juta lagi untuk proyek yang terkait dengan pinjaman mata uang lokal. Sedangkan pada tahun 2019, untuk melanjutkan dan mencukupi kebutuhan dari program baru terkait dengan implementasi lanjutan dari ENP dan AA, UE kembali memberikan dana sebesar €160 juta. Program tersebut yaitu *Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP)*, yang berupa dukungan untuk tindakan *peacebuilding*, stabilisasi dan pemulihan semasa konflik (European Commission 2019).

3. Sektor Keamanan dan Pertahanan

Berbeda halnya dengan sektor perekonomian yang berfungsi untuk mengembalikan stabilisasi di Ukraina, maupun aspek kemanusiaan yang berfokus pada upaya meminimalisir isu kemanusiaan dan penyelesaian konflik, sektor keamanan dan pertahanan melalui militer bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina. Melihat dari adanya aneksasi ilegal yang dilakukan oleh Rusia, serta berlangsungnya konflik di Timur Ukraina yang masih melibatkan Rusia didalamnya, Ukraina dirasa perlu untuk meningkatkan pertahanan negaranya. Untuk itu UE menerapkan beberapa program terkait dengan upaya peningkatan keamanan Ukraina diantaranya yakni:

- *Eastern Partnership Police Cooperation Programme*, merupakan salah satu proyek dalam instrumen ENP yang diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dari para polisi. Utamanya dalam pelatihan terkait manajemen dan pelaksanaan operasi kepolisian.
- *Support for Border Management Sector Policy in Ukraine*, adalah proyek berupa dukungan anggaran sebesar €66 juta yang dikhususkan untuk menunjang perlengkapan militer bagi para aparat keamanan negara.
- Selanjutnya yakni kegiatan tambahan dari *Euroapol* dan *Frontex* yang diharapkan dapat menunjang pelatihan pasukan keamanan di Ukraina (Litra et al. 2017).

Peaceful Negotiations

Upaya selanjutnya yakni melalui tindakan negosiasi dan mediasi untuk mencapai perjanjian damai agar perselisihan yang terjadi baik di Krimea maupun Timur Ukraina dapat menemui titik terang. Utamanya agar pelanggaran kemanusiaan beserta korban jiwa di wilayah konflik tersebut tidak terus meningkat.

- *Geneva Format*

Agenda pertama yang telah diatur oleh UE untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Ukraina ialah melalui *Geneva Joint Statement* pada 17 April 2014. Atau lebih tepatnya, tidak berselang lama sejak munculnya konflik di Ukraina ke permukaan. Pertemuan ini difasilitasi oleh UE dengan tujuan untuk meminimalisir ketegangan dan tensi diantara Ukraina-Rusia, agar keamanan bagi masyarakat didalamnya dapat segera tercapai. Disini, UE meminta pihak-pihak terkait, yakni Ukraina dan Rusia, untuk menahan diri supaya penggunaan kekerasan maupun militer dari kedua belah pihak dapat dihentikan. Tak hanya itu, UE pun menekankan permintaannya pada pihak Rusia agar menarik kembali pasukannya di perbatasan Ukraina dan membatalkan izin penggunaan kekuatan militer di wilayah Ukraina. Sedangkan bagi Ukraina, diusulkan untuk segera mengajukan Undang-Undang amnesti bagi mereka, para separatistis, yang bersedia untuk meninggalkan wilayah Ukraina Timur secara damai. Diharapkan saran-saran dari UE untuk mengakhiri konflik ini akan diterapkan baik oleh Ukraina maupun Rusia. Kemudian untuk menindaklanjuti

implementasi dari usulan ini, *Geneva Joint Statement* dialihkan pada pertemuan berikutnya, yakni *Geneva Format*, dengan bantuan dari *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) (Council of the European Union 2014).

Rekomendasi yang diusulkan oleh UE kepada Ukraina dan Rusia rupanya hampir memperoleh kata 'sepakat'. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan dari kelompok separatis di Timur Ukraina yang akan menyetujui permintaan tersebut setelah adanya tawaran amnesti bagi mereka. Akan tetapi, bersamaan dengan dokumen yang hendak diratifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat, UE dan Ukraina dengan segera justru menyatakan bahwa Rusia merupakan pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya konflik di Timur Ukraina. Dengan ini, Rusia diharuskan untuk melaksanakan proses pelimpahan kekuasaan konstitusional atas wilayah yang dianeksasinya kembali ke Ukraina. Inilah yang kemudian menjadi awal dari kegagalan *Geneva Format*, dimana setelahnya, pihak Rusia tidak memenuhi komitmennya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui (Litra et al. 2017).

- *Normandy Summit*

Dengan pertimbangan atas ketidakefektifan yang terlihat pada *Geneva Format*, Jerman dan Prancis yang merupakan negara anggota dari UE, dengan segera merencanakan pertemuan baru tanpa partisipasi dari UE secara langsung. Meskipun tidak melibatkan UE secara langsung, namun keduanya tetap bergerak atas nama dan suara dari UE (Elgström et al. 2018). Pertemuan yang digelar pada 6 Juni 2014 ini dibentuk lantaran kekerasan di wilayah Timur Ukraina semakin meningkat, sedangkan satu-satunya kesepakatan yang diharapkan dapat meredam itu tidak memberikan pengaruh apapun. Oleh karena itu, upaya intensif terus dilancarkan untuk mendukung terlaksananya *Normandy Summit* yang diikuti oleh Jerman, Perancis, Ukraina, Rusia dan representasi dari kelompok separatis di wilayah Timur Ukraina. Disini Kanselir Jerman, Angela Merkel, berusaha keras membawa Rusia khususnya Presiden Putin ke meja perundingan menggunakan pengaruhnya untuk membahas mengenai perjanjian gencatan senjata dan mengakhiri konflik di Timur Ukraina (Gressel 2016). Hingga pada akhirnya, upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Tepatnya pada September 2014, pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan ini akhirnya menyetujui gencatan senjata setelah proses negosiasi yang panjang dan melelahkan (Tanner 2016). Keberlanjutan dari implementasi atas kesepakatan ini kemudian diberlakukan dalam *Minsk Protocol*.

- *Minsk Protocol I & II*

Kelanjutan dari *Normandy Summit* sebelumnya kemudian dilaksanakan melalui *Minsk Protocol I* yang digelar pada Februari 2015. Pertemuan *Minsk Protocol I* ini utamanya membahas mengenai gencatan senjata, penarikan senjata berat dan pertukaran tahanan antara Ukraina dan Rusia. Namun, karena poin-poin dan jadwal kesepakatan dalam *Minsk Protocol I* ini terbilang kabur dan tidak jelas, kesepakatan ini kemudian menjadi tidak dapat diterapkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, *Minsk Protocol II* yang setelahnya menjadi alternatif dari pelaksanaan *Minsk Protocol I* yang telah gagal (Gressel 2016).

Pertemuan *Minsk Protocol II* yang dilaksanakan pada Maret 2016 mengadopsi poin-poin dalam *Minsk Protocol I* seperti pelaksanaan gencatan senjata, penarikan senjata berat, pertukaran tahanan dan beberapa poin lainnya. Namun rupanya, pertemuan tersebut menghasilkan solusi atas konflik di Ukraina yang berupa pengeluaran UU Status Khusus bagi wilayah Donbas Region, dimana pemerintah Ukraina nantinya akan memberikan otonomi kepada daerah Donbas Region di Timur Ukraina yang dikontrol oleh para kelompok separatis. Pembebasan wilayah konflik Timur Ukraina, Donbas Region, ini diikuti dengan diizinkannya pelaksanaan pemilihan umum atas pemerintah Donbas Region untuk

menentukan sendiri pemerintahnya. Adapula beberapa poin yang mengikuti pembahasan ini diantaranya yaitu 1.) Undang-Undang tentang pemerintahan independen di wilayah Timur Ukraina yang dikuasai oleh kelompok separatis harus dilengkapi dengan amandemen konstitusi, 2.) Ketentuan sosial dan pembayaran lainnya dari Kyiv, ibukota Ukraina, ke Donbas Region harus tetap dilanjutkan, 3.) Penundaan kontrol perbatasan Rusia-Ukraina sementara waktu sampai seluruh proses kesepakatan diimplementasikan oleh kedua belah pihak (Gressel 2016).

Akan tetapi, solusi ini tentu saja tidak disetujui oleh sebagian besar masyarakat Ukraina. Masyarakat menilai bahwasannya solusi ini cenderung terlihat sebagai konsesi bagi 'musuh' dan memperlihatkan dengan jelas bahwa pemerintah Ukraina sendiri juga bersedia untuk mengorbankan Ukraina demi reputasinya di lingkup internasional. Dengan opini masyarakat yang sedemikian rupa, Ukraina secara tidak langsung berada di posisi yang tidak menguntungkan, dimana persetujuan atas *Minsk Protocol* dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sedangkan penolakannya justru menimbulkan kritik terus-menerus dari pihak eksternal pada Ukraina. Oleh karena itu, *Minsk Protocol II* ini kembali menemui jalan buntu lantaran pemerintah Ukraina memiliki ketakutan akan pecahnya kembali Revolusi Euromaidan seperti yang pernah terjadi ditahun akhir tahun 2013 dan kembali membuat Ukraina berada dalam kondisi ketidakstabilan politik. Sebagaimana pemberian UU Status Khusus terhadap wilayah Timur Ukraina tersebut sempat memunculkan bentrok antara aparat keamanan dengan masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang menewaskan dua polisi sedangkan 100 orang lainnya luka-luka (Gressel 2016).

- *Normandy Summit 2019*

Sejak kegagalan *Minsk Protocol* di tahun 2016, maka kekerasan atau penggunaan militer di area konflik Timur Ukraina kembali berlanjut. Pun setelah gagalnya kesepakatan tersebut, UE bisa dikatakan 'vakum' dari upaya pelaksanaan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai dan menghentikan konflik di Ukraina. Sampai dengan berselang tiga tahun lamanya, barulah UE yang kembali diwakili oleh Jerman dan Perancis melanjutkan upaya yang telah mereka lakukan sebelumnya, yakni dalam *Normandy Summit* yang digelar pada akhir tahun 2019. Pertemuan ini kembali mengejar kesepakatan damai terkait gencatan senjata, pertukaran tahanan dan evolusi politik yang kerap kali menuai kegagalan selama 6 tahun terakhir (Gorchinskaya 2019).

Pertemuan ini akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Ukraina dan Rusia akan berkomitmen terhadap pelaksanaan gencatan senjata penuh sebelum akhir tahun yang diikuti dengan pertukaran tahanan masing-masing pihak. Menindaklanjuti implementasi dari kesepakatan ini, keduanya juga setuju untuk meningkatkan mandat dari misi pemantauan OSCE, yang memberikan izin pada OSCE untuk memantau zona konflik sepanjang 24/7. Namun, sesaat setelah pertemuan ini digelar, gerakan protes dari masyarakat Ukraina kembali turun ke jalan lantaran adanya ketakutan bahwa presiden Ukraina saat ini, Volodymyr Zelensky, akan menyerah pada tekanan politik Rusia dan tidak memperjuangkan integritas wilayah Ukraina (Gorchinskaya 2019). Kemudian, terkait dengan bagaimana pelaksanaan atas kesepakatan damai dalam *Normandy Summit* yang dilaksanakan di Paris di akhir tahun 2019 ini, belum ada data konkret lebih lanjut sampai dengan pembuatan paper ini.

Forceful Intervention

Melihat upaya mediasi dan negosiasi yang telah berulang kali dilakukan namun hasilnya selalu berakhir dengan kegagalan yang diakibatkan oleh salah satu atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibentuk, maka penerapan strategi yang bersifat

koersif mulai dipertimbangkan. Terlebih, ketika penggunaan cara damai dinilai kurang mampu membangun terciptanya perdamaian antara Ukraina-Rusia. Untuk itu, sebagai upaya cadangan, UE turut mengeluarkan dan memberlakukan sanksi kepada Rusia, yang diharapkan dapat memojokkan posisinya hingga terpaksa mengikuti kesepakatan yang telah dibentuk sebelum-sebelumnya.

Tindakan pemberian sanksi yang pertama berupa ‘pembekuan’ Rusia dari pertemuan dan agenda-agenda internasional (Haukkala 2018). Terbukti dari UE yang menunda segala bentuk pertemuan dan pembicaraan bilateral dengan Rusia, utamanya terkait dengan visa dan perjanjian-perjanjian baru (Ivashchenko-Stadnik et al. 2018). Hal ini dirasa cukup sebagai sanksi pertama melihat UE, beserta negara-negara anggotanya, adalah mitra utama Rusia. Tak hanya itu, UE juga turut mendukung penangguhan negosiasi terkait pembahasan bergabungnya Rusia dalam OECD dan *International Energy Agency* (IEA) (European Council n.d.).

Mengikuti sanksi yang pertama, tepatnya setelah aneksasi ilegal Rusia di Krimea, UE kembali mengeluarkan sanksi pada Rusia yang berupaya untuk menargetkan orang-orang yang dirasa bertanggungjawab atas tindakan Rusia melanggar kedaulatan dan integritas wilayah di Ukraina. Termasuk diantaranya yaitu para pejabat yang dekat dengan Presiden Putin (Haukkala 2018). Sanksi ini direalisasikan melalui larangan perjalanan dan pembekuan aset, yang telah ditujukan kepada 175 orang dan 44 entitas dengan dakwaan adanya tindakan yang melanggar integritas, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. Sanksi yang dikeluarkan untuk Rusia pada Maret 2014 ini kemudian terus diperpanjang sampai dengan 15 September 2020 (European Council n.d.).

Selanjutnya, UE kembali mengadopsi langkah koersif dengan dikeluarkannya sanksi berupa pembatasan hubungan ekonomi UE dengan wilayah Krimea yang dianeksasi oleh Rusia. Langkah-langkah ini diantaranya ialah larangan ekspor dan impor barang dengan Krimea, pembatasan perdagangan dan investasi dari perusahaan-perusahaan asal UE ke Krimea serta larangan untuk memasok layanan pariwisata di Krimea. Sanksi ini berlaku sampai dengan 23 Juni 2020 (European Council n.d.).

Adapula sanksi yang berikutnya yang kembali diterapkan dengan memperluas cakupan sanksi pasca berlangsungnya peristiwa penembakan jatuh maskapai *Malaysia Airlines* yang menewaskan ratusan orang. UE pun segera merespon tindakan ini menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, mulai dari membatasi akses Rusia ke dalam pasar modal UE, melarang ekspor-impor perdagangan senjata untuk penggunaan militer antara UE-Rusia, membatasi akses Rusia atas teknologi tertentu yang digunakan untuk produksi dan eksplorasi minyak, serta melarang pembelian maupun penjualan obligasi dan ekuitas terhadap Rusia. Sanksi ekonomi ini telah beberapa kali diperpanjang dan berakhir pada 31 Juli 2020 (European Council n.d.).

Tak berhenti sampai disitu, UE juga menangguk penandatanganan keberlanjutan operasi finansial baru di Rusia oleh Bank Investasi Eropa sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap tindakan Rusia kepada Ukraina (Ivashchenko-Stadnik et al. 2018). Disini, negara-negara anggota UE sepakat untuk menunda pembiayaan operasi kerjasama ekonomi baru dengan Rusia. UE pun mengkaji ulang program-program kerjasama bilateral maupun regional dengan Rusia yang berakhir dengan beberapa program ditangguk (European Council n.d.).

Dengan adanya sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh UE selaku institusi supranasional dengan kekuatan dan pengaruh yang cukup diperhitungkan, sanksi ini dirasa cukup berpengaruh untuk Rusia, sebagaimana UE merupakan pasar utama Rusia dan begitupun sebaliknya. Pun sampai dengan tahun 2019, sanksi-sanksi ini kerap kali diperpanjang

sehingga masih terus berlaku untuk Rusia. Akan tetapi, Rusia terbilang cukup kuat untuk membalikkan keadaan ini, dimana ia juga memberlakukan pemblokiran atas ekspor makanan kepada negara-negara UE yang merupakan pasar besar Rusia (Ivashchenko-Stadnik et al. 2018).

Kondisi Ukraina

Setelah adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh UE sebagai upaya untuk merespon dan menanggapi Krisis Ukraina, dapat terlihat beberapa perubahan atas kondisi di dalam negeri Ukraina. Kondisi perekonomian Ukraina sedikit demi sedikit mulai kembali stabil. Hal ini dapat terbukti dari PDB Ukraina yang mulai meningkat sebesar 2,5% di tahun 2017, kemudian 3,3% di tahun 2018 dan kembali naik sebesar 3,84% pada 2019. Pun seiring dengan peningkatan PDB ini, tingkat inflasi di Ukraina juga mulai menurun (European Commission 2019).

Namun berbeda halnya dengan kondisi keamanan dan kemanusiaan di Ukraina, atau lebih tepatnya di area-area konflik yakni Krimea dan Timur Ukraina. Dilansir dari laporan Uni Eropa pada tahun 2019, kekerasan militer masih terus berlangsung di wilayah Timur Ukraina, sedangkan Krimea juga masih berada dibawah kekuasaan Rusia (European Commission, 2019). Oleh karena itu, korban jiwa akibat pelanggaran kemanusiaan di Ukraina masih berjatuh sampai dengan saat ini, mengingat upaya negosiasi damai dan sanksi yang dikeluarkan oleh UE tidak berhasil menghentikan gencatan senjata di area konflik.

Kesimpulan

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasannya UE sebagai institusi supranasional memiliki kewenangan untuk merespon Krisis Ukraina sebagaimana adanya kepentingan dari UE untuk menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan sekitarnya. Respon ini dapat terlihat dari dikeluarkannya kebijakan dan program-program yang ditujukan khusus untuk merespon Krisis Ukraina ini. Merujuk pada indikator dari *Responsibility to Protect*, dapat terbukti bahwasannya UE telah menerapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi isu kemanusiaan di Ukraina. Namun, dari sini, dapat terlihat bahwasannya tindakan tersebut dapat berjalan dua arah yakni mengatasi isu kemanusiaan sekaligus mengupayakan penghentian konflik di Ukraina. Pun, dari upaya-upaya UE yang telah dijelaskan, dapat terlihat bahwa UE cukup cakap dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan indikator dari *Responsibility to Protect* tersebut. Walaupun, upaya ini belum berhasil mencapai perdamaian melihat kegagalan dari negosiasi damai kerap kali disebabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri yakni Ukraina dan Rusia.

Daftar Pustaka

Buku

Gruber, L., 2000. *Ruling the world: Power politics and the rise of supranational institutions*. New Jersey: Princeton University Press.

Haukkala, H., 2018. 'Crowdfunded Diplomacy'? The EU's Role in the Triangular Diplomacy Over the Ukraine Crisis. In: V. L. Birchfield & A. R. Young, eds. *Triangular Diplomacy Among the United States, the European Union, and the Russian Federation: Responses to the Crisis in Ukraine*. Atlanta: Palgrave Macmillan, pp. 77-94.

Lamont, C., 2015. *Research Methods in International Relations*. Sage.

Jurnal Ilmiah

Bebler, A., 2015. The Russian-Ukrainian Conflict Over Crimea. *Teorija in Praksa*, 52(1-2), pp. 196-219.

Bojcun, M., 2015. Origins of the Ukrainian Crisis. *Critique: Journal of Socialist Theory*, 43(3-4), pp. 395-419.

Cross, M. K. D. & Karolewski, I. P., 2016. What Type of Power has the EU Exercised in the Ukraine–Russia Crisis? A Framework of Analysis. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 55(1), pp. 1-17.

Elgström, O. et al., 2018. Perceptions of the EU's Role in the Ukraine-Russia and the Israel-Palestine Conflicts: A Biased Mediator?. *International Negotiation*, 23(2), pp. 299-318.

Gehring, T., Urbanski, K. & Oberthur, S., 2017. The European Union as an Inadvertent Great Power: EU Actorness and the Ukraine Crisis. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 55(4), pp. 727-743.

Haukkala, H., 2015. From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU–Russia Relations. *Journal of Contemporary European Studies*, 23(1), pp. 25-40.

Kabau, T., 2012. The Responsibility to Protect and the Role of Regional Organizations: an Appraisal of the African Union's Interventions. *Goettingen Journal of International Law*, 4(1), pp. 49-92.

Mandel, D., 2016. The conflict in Ukraine. *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, 24(1), pp. 83-88.

Robertshaw, S., 2015. Why the EU got the Ukrainian crisis wrong. *Global Affairs*, 1(3), pp. 335-343.

Ruszkowski, J., 2009. Supranationalism between the nation-state and international cooperation. *Journal of public administration and policy research*, 1(1), pp. 004-010.

Scrinic, A., 2014. Humanitarian aid and political aims in Eastern Ukraine: Russian involvement and European response. *Eastern Journal of European Studies*, 5(2), pp. 77-88.

Tanner, F., 2016. The OSCE and the Crisis in and around Ukraine: First Lessons for Crisis Management. *In OSCE Yearbook 2015*, pp. 241-250.

Laporan Resmi

Council of the European Union, 2014. *Press Release: 3312th Council meeting*, Brussels: European Union.

European Commission, 2015. *How the EU is supporting Ukraine*, Brussels: European Union.

European Commission, 2016. *Association Implementation Report on Ukraine*, Brussels: European Union.

European Commission, 2019. *Association Implementation Report on Ukraine*, Brussels: European Union.

European Union, 2014. *ASSOCIATION AGREEMENT between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part*. European Union.

European Union, 2018. *The European Union: What It Is and What It Does*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gressel, G., 2016. *Keeping Up Appearances: How Europe is Supporting Ukraine's Transformation*, London: The European Council on Foreign Relations.

Ivashchenko-Stadnik, K., Petrov, R., Rieker, P. & Russo, A., 2018. *Implementation of the EU's crisis response in Ukraine*, EUNPACK.

Litra, L., Medynskiy, I. & Zarembo, K., 2017. *Assessing the EU's conflict prevention and peacebuilding interventions in Ukraine*, Whole of Society Conflict Prevention and Peacebuilding (WOSCAP).

OECD, 2018. *Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine*, Paris: OECD Publishing.

ReliefWeb, 2018. *Humanitarian Needs Overview: Ukraine*, ReliefWeb.

Artikel Daring

BBC, 2020. *BBC*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-europe-18010123> [Accessed 19 April 2020].

Europa Nu, 2015. *Europa Nu*. [Online] Available at: https://www.europa-nu.nl/id/vju4rbpx9yy7/nieuws/how_the_eu_is_supporting_ukraine?ctx=vi4vbw1tpls3 [Accessed 25 May 2020].

European Commission, 2019. *European Union*. [Online] Available at: https://ec.europa.eu/echo/news/eu-ukraine-summit-eu-provides-additional-177-million-humanitarian-funding-along-line-conflict_en [Accessed 25 May 2020].

European Commission, n.d. *European Union*. [Online] Available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_en [Accessed 3 May 2020].

European Council, n.d. *European Union*. [Online] Available at: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/> [Accessed 28 May 2020].

European Union External Action, 2016. *Official Website of the European Union*. [Online] Available at: https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp/330/european-neighbourhood-policy-enp_en [Accessed 19 April 2020].

European Union, n.d. *European Union*. [Online] Available at:

<https://www.euneighbours.eu/en/policy#the-eastern-partnership> [Accessed 25 May 2020].

European Union, n.d. *Official Website of the European Union*. [Online] Available at: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en [Accessed 6 March 2020].

European Union, n.d. *Official Website of the European Union*. [Online] Available at: https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_en [Accessed 19 April 2020].

Gorchinskaya, K., 2019. *Forbes*. [Online] Available at: <https://www.forbes.com/sites/katyagorchinskaya/2019/12/10/the-normandy-summit-ended-what-has-it-achieved/#35be24fb3061> [Accessed 26 May 2020].

King, I., 2019. *Center for Strategic and International Studies*. [Online] Available at: <https://www.csis.org/analysis/not-contributing-enough-summary-european-military-and-development-assistance-ukraine-2014> [Accessed 2 May 2020].

Langenhove, L. V. & Maes, L., 2012. *United Nations University*. [Online] Available at: <https://unu.edu/publications/articles/the-role-of-the-eu-in-peace-and-security.html> [Accessed 12 March 2020].